



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0002.5.1.02.02.01.0026

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah Anggaran (DPA) : 54,000,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 54,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BUKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				48,000,000.00
2	05 April 2024	00157	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	46,500,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	1,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	6,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	7,500,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BALITRANGDA
NIRWAN SUTAWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730423 200802 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

St. NUR AISYAH S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Makassar, 04 April 2024

Revisi 101.

PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Nomor : 00001/SP/BLIT/IV/2024

Perihal : Pemindahtoran

Lampiran : 2

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahtorkan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.000031E367

Atas Nama : BADAN USA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada Tanggal : 04 April 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir

Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir

NPWP :

Uraian : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN KAWANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVERSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024

Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

NO.	KODE RESORNSING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.500.000.00
Jumlah Pembekalan			1.500.000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	130.800.3106013005	Jarak Jaminan Kesehatan 1%	702404040750517	36.433.00
2	17035001000/ Bank BPD Sulaibar	Jaminan Hari Tua (JHT)		85.500.00
Jumlah Potongan				121.933.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Nilai yang ditransfer				1.378.067.00

Uang sejumlah : (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 04 April 2024

SEKRETARIS PENGELUARAN

ST. HILAL ARIYAH, S.Pd
NIP : 19800320 200410 2 001

X 00'000'00S'1 0 00'000'00S'1 : 10110 1010

X 00'490'81S'1

X 00'00S'02

X 00'01S'02

0 00'000'00S'1

10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110

10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110

10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110

10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110

10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110 10110

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0002.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00157

Tanggal : 05-04-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024

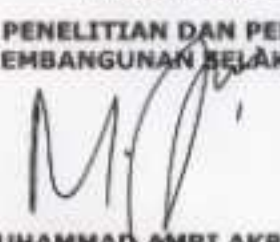
DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGELOLA ANGGARAN

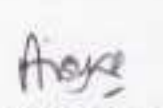

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

MENGETAHUI

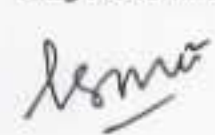
KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN SELAKU PPTK


Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP.,M.Si
NIP. 197207161998031007

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Makassar, 05-04-2024
Yang Menerima,

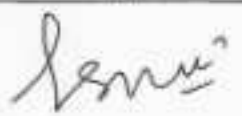


Jumlah Uang Rp. 1.500.000,-

NO. DAFTAR: 00104/505000000020000/2024

**DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI
DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor / Tanggal SK : 281/setda/188.4/TAHUN 2024 / 11 Januari 2024
Kegiatan : 5.05.02.2.04 / Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0002 / Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Rekening : 5.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	ISMAYUNDARI R. ISKAL 81.942.915.0-808.000 Rekening : 1302010000506828	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor)	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	
	JUMLAH					1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	

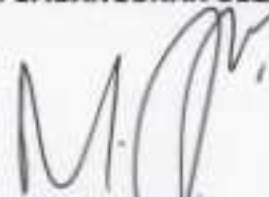
TERBILANG: SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197204252005021001

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN SELAKU PPTK


Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 197207161998031007

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul azzahra

Cabang : Kantor Kas Balikpapan MKS

No Resi : 419534

Bulan Iuran : 11/2025
Nomor : 17035501000 / 240400455475
Pembayaran :
Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Perusahaan : DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor NPP : 17035501
Kode Divisi : 000
Jumlah Iuran : Rp.85.500,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah,
Terima Kasih.



Teller : Nurul azzahra

Cabang : Kantor Kas Balikpapan MKS

No Resi : 419534

Bulan Iuran : 11/2025
Nomor : 17035501000 / 240400455475
Pembayaran :
Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN
Perusahaan : PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor NPP : 17035501
Kode Divisi : 000
Jumlah Iuran : Rp.85.500,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah,
Terima Kasih.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassar.kota.go.id, Pos-el sekretariat@makassar.kota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 281/SETDA/188.4/TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN
PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL
REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Daerah Kota Makassar Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menunjuk Jasa Tenaga Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

Memperhatikan: Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 3475 /188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk 3(tiga) Orang Tenaga Administrasi sebagai Tenaga Penunjang Pelaksana pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Invensi dibidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Kepada 3(tiga) Orang Tenaga Administarsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, sesuai rincian anggaran dan belanja, pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Teknologi Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:

1. Rp1.500.000,00 /Orang/Bulan

b. Belanja iuran /jaminan asuransi:

1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelakaan : Rp3.600,00/Orang/Bulan

3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan

- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan sebagai optimalisasi kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
 pada tanggal 11 JANUARI 2024
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 FIRMAN DAMID PAGARRA

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/028/KEP/II/2024

TENTANG
PEMBERIAN JASA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI
COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN
INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan belanja jasa administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 3475/188/4.45/Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;
19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 304/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN JASA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan jasa administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIK	JABATAN
1	ISMAYUNDARI R. ISKAL, S. Sos	7371126701940001	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Belanja jasa administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Februari 2024
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**



NIRWAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.